

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Kesejahteraan Hidup

Kesejahteraan hidup merupakan suatu siklus yang melibatkan beberapa perubahan aspek dasar kehidupan manusia yang tidak meningkat terhadap suatu keadaan yang lebih baik dalam kelompok masyarakat, gaya hidup dan hubungan sosial. Menurut Magrabi et al. dalam Sari, M.E.P, Pratiwi, D.A (2018), kesejahteraan di definisikan sebagai suatu keadaan sehat, nyaman dan senang dari konsumsi barang dan pelayanan

Paradigma baru dirumuskan oleh UNDP, yang disebut Human Development Index (HDI). Dalam pendekatan ini pertumbuhan ekonomi maupun sosial mendapat tempat penting dalam perhitungan indeks, karena jelas variabel ini sangat diperiukan untuk peningkatan kesejahteraan. Dalam HDI telah digabungkan antara pendapatan nasional dengan dua indikator sosial, yaitu angka harapan hidup, tingkat melek huruf atau lamanya sekolah dan sebagainya. Dengan dikeluarkannya Human Development Index (UNDP), terjadi perubahan perspektif yang tercermin pada pembangunan kualitas manusia. Pendekatan ini menitikberatkan pada manusia sebagai titik sentral pembangunan; bahwa pembangunan pada hakekatnya adalah untuk menaikkan kualitas manusia dan masyarakatnya yang memiliki tiga elemen yaitu kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonominya.

Menurut Bps-Bappenas-Undp (2004) Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator. salah satu indikator yang di pakai adalah indeks pembangunan manusia yang mengukur capaian umum suatu daerah dalam dimensi utama pembangunan manusia. IPM adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia yang mencakup empat variabel, yaitu (1) harapan hidup, (2) harapan lama sekolah, (3) rata-rata lama sekolah dan (4) penghasilan riil kapita yang disesuaikan.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1990:1) Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia . Dari definisi ini dapat di tarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu Negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat Ukur yang dapat di gunakan dalam upaya dan kinerja, pembangunan manusia di suatu wilayah UNDP (1990). Pada dasarnya IPM mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dari penduduk, yaitu:

- 1) Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup,
- 2) Berpengetahuan dan berketerampilan,
- 3) Akses terhadap sumber daya yang di butuhkan untuk mencapai tandarhidup layak.

Adapun cara menghitung Nilai Indeks Pembangunan Manusia ialah:

$$IPM = \sqrt{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

Setelah mengetahui nilai dari IPM, maka perlu ada yang namanya kriteria pengklasifikasian. Menurut UNDP, kriteri Indeks Pembangunan Manusia juga dibagi menjadi:

- $IPM \geq 80$ Kategori sangat tinggi
- $70 \leq IPM < 80$ Kategori tinggi
- $60 \leq IPM < 70$ Kategori sedang
- $IPM < 60$ Kategori rendah.

b. Indikator Pengukur Indeks Pembangunan Manusia

Ada 3 indikator dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia:

1) Dimensi Kesehatan

Dalam menghitung Indeks Kesehatan, digunakan angka harapan hidup sebagai indikator. Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat di tempuh seseorang selama hidup. Rumusan yang digunakan untuk menghitung indeks kesehatan di adopsi dari UNDP adalah:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Ket:

AHH = Angka Harapan Hidup

AHH_{min} = Angka Harapan Hidup Minimum = 25

AHH_{maks} = Angka Harapan Hidup Maksimum = 85

2) Dimensi Pendidikan

Dalam menghitung Indeks Pendidikan, digunakan harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Rata- rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rumusan yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan di adopsi dari UNDP adalah:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Ket:

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS_{min} = Harapan Lama Sekolah Minimum = 0

HLS_{maks} = Harapan Lama Sekolah Maksimum = 18

RLS = Rata – Rata Lama Sekolah

RLS_{min} = Rata – Rata Lama Sekolah Minimum = 0

RLS_{maks} = Rata – Rata Lama Sekolah Maksimum = 15

3) Dimensi Pengeluaran/Daya Beli

Indeks daya beli mengakomodir besarnya perubahan dalam pengeluaran per kapita setahun yang di sesuaikan. Pengeluaran per kapita rill yang di sesuaikan mengakomodir besarnya pengeluaran per kapita rill di masing-masing wilayah berdasarkan patokan perubahan harga kota besar tertentu. Untuk menghitung indeks daya beli di gunakan rumusan dari BPS dan UNDP adalah sebagai berikut :

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Ket:

$I_{\text{pengeluaran}}$ = Indeks Pengeluaran

$\ln(\text{pengeluaran}_{\min})$ = Indeks Pengeluaran Minimum = Rp. 360.000

$\ln(\text{pengeluaran}_{\max})$ = Indeks Pengeluaran Maksimum = Rp. 732.720

3. Angka Harapan Hidup

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) perkiraan jumlah tahun hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu. Harapan Hidup merupakan jumlah rata – rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang.

Harapan hidup saat lahir adalah rata-rata usia yang dapat dicapai bayi tersebut dalam kondisi saat itu. Karena di negara berkembang banyak kematian

terjadi selama masa bayi dan kanak-kanak, maka rata-rata harapan hidupnya jauh lebih rendah daripada di negara maju.

Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas (Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi skala besar suatu populasi, per dikali satuan) yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun, hingga, rata-rata mortalitas sebesar 9.5 berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun.

Rumusan yang digunakan idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (age specific death rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian

Kegunaan Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program social lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

4. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap

bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Contohnya Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nias pada tahun 2020 adalah sebesar 12,57 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang adalah selama 12,57 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan kelas XII SMA. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi Pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka harapan lama sekolah adalah 18, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

5. Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung Rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Contohnya Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nias pada tahun 2020 adalah sebesar 5,36 tahun. Artinya bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kabupaten Nias dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 5 Sekolah Dasar (SD). Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun

ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi:

- a. Partisipasi sekolah
- b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki
- c. Ijasah tertinggi yang dimiliki
- d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (mean years of schooling) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang Pendidikan yang ditamatkannya. Perhitungan rata – rata lama sekolah menggunakan dua Batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata – rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

6. Pengeluaran/Daya Beli

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu capaian pembangunan manusia dalam mewujudkan kehidupan yang layak terkait dengan konsumsi riil perkapita. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Rata – rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.

Pengertian daya beli masyarakat menurut Dr. Supawi pawengan adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Daya beli masyarakat ini ditandai dengan meningkat ataupun menurun,

dimana daya beli meningkat jika lebih tinggi dibanding periode lalu sedangkan daya beli menurun ditandai dengan lebih tingginya kemampuan beli masyarakat dari pada periode sebelumnya. Penghitungan Paritas Daya Beli Dihitung dari bundel komoditas makanan dan non makanan. Kegunaannya adalah menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp. 732.720,- . Sementara itu sampai tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp. 300.000,- , sedangkan sejak tahun 1999, batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi di Indonesia

7. Sarana dan Prasarana

Pengertian sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah “segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alternatif atau media dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb)”.^{THE}

Grigg (1988 dalam Kodoatie, 2005:8) mengatakan bahwa prasarana adalah kelengkapan fondasi fisik yang memungkinkan suatu lingkungan, kawasan, kota, atau ruang spasial dapat berfungsi dengan baik. prasarana adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, irigasi, drainase, bangunan, dan fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di bidang sosial ekonomi.

Sementara itu adapun menurut Jayadinata (1992) prasarana merupakan faktor potensial yang sangat penting bagi arah dan pengembangan wilayah ke depan. Tanpa dukungan infrastruktur yang tepat, pembangunan tidak akan berhasil atau sukses. Prasarana perkotaan adalah fasilitas umum yang terutama menunjang terselenggaranya proses dan kegiatan di suatu kota yang pada akhirnya menentukan perkembangan kota tersebut. Infrastruktur perkotaan dengan demikian merupakan fasilitas umum yang terutama mendukung terselenggaranya proses dan kegiatan di kota yang pada akhirnya menentukan perkembangan kota.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perumahan di Perkotaan, jenis - jenis sarana terbagi menjadi:

- b. Sarana perniagaan/perbelanjaan
- c. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan
- d. Sarana pendidikan
- e. Sarana kesehatan
- f. Sarana peribadatan
- g. Sarana rekreasi dan olahraga
- h. Sarana pemakaman
- i. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau
- j. Sarana parkir

Lalu adapun prasarana terdiri dari:

- a. Jaringan jalan
- b. Jaringan saluran pembuangan air limbah
- c. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase)
- d. Tempat pembuangan sampah

B. Penelitian yang Relevan

Murniati, (2017) dalam penelitian berjudul “Analisi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Kerinci”. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan yang dilakukan oleh peneliti Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 membuktikan adanya perbedaan pendapatan per kapita di Kabupaten Kerinci antara empat tahun sebelum pemekaran (2005-2008) dengan tahun keempat setelah pemekaran (2010-2013). ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $9,991 > 3,18245$.

Neti dan Cahyadinata (2014), melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu”. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, serta Uji Beda T merupakan analisis yang digunakan pada penelitian ini. PDRB, PDRB per kapita serta pertumbuhan angka kemiskinan merupakan variabel yang digunakan pada penelitian ini. Pada Provinsi Bengkulu bagian daerah pesisir, menunjukkan kinerja ekonomi menggunakan hasil pra dan pasca pemekaran ialah a). Pra dan pasca pemekaran tidak menyebabkan perbedaan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, b). Pasca terjadinya pemekaran variabel PDRB per kapita lebih meningkat dari pada pra pemekaran, c). Pra dan pasca pemekaran tidak berdampak terhadap variabel angka kemiskinan.

Nizar, (2019), pada penelitiannya yang berjudul “Analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh”. Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini. Uji Chow, Lagrange Multiplayer, dan Uji Hausman merupakan analisis yang dipakai. Variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah IPM, Tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita, serta presentase penduduk miskin.

Sehingga mendapatkan hasil bahwa ada setelah pemekaran ada 10 kabupaten maupun kota yang efektif dalam pertumbuhan IPM dibanding daerah pemekaranya, dan ada 3 daerah kabupaten atau kota yang tidak efektif dalam pertumbuhan IPM.

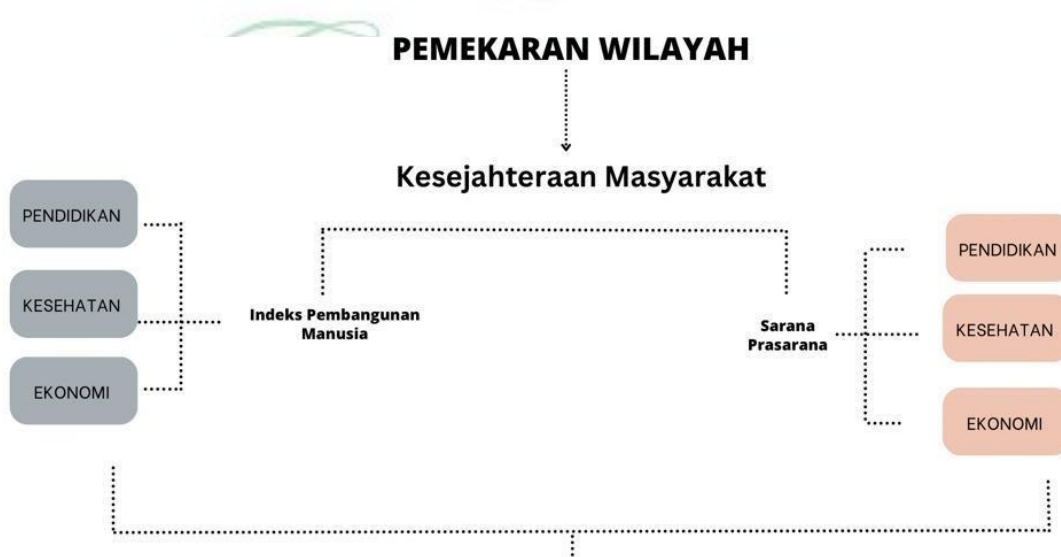
Hakim (2017), melaksanakan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau”. Metode dokumentasi dan Uji Independent Sampel Test, menjadi metode pengumpulan data serta uji analisis yang diterapkan pada penelitian ini. Ada 5 variabel aspek kinerja perekonomian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendapatan perkapita ADHK, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi ADHK, pertumbuhan penduduk tidak miskin, kontribusi PDRB kabupaten. Sedangkan ada 7 variabel aspek pelayanan public, yakni rasio siswa per sekolah (SD dan SMP), rasio siswa per sekolah (SMA), rasio siswa per guru (SD dan SMP), rasio siswa per guru (SMA), rasio ketersediaan tenagakesehatan, kualitas infrastruktru jalan, serta rasio ketersediaan fasilitas Kesehatan. Sehingga mendapatkan hasil penelitian adalah di Kabupaten Kepulauan Meranti aspek kinerja perekonomian tidak dapat mengimbangi daerah induknya dalam segi kinerja daerah, namun pada segi pelayanan public Kabupaten Meranti dapat mengimbangi daerah induknya.

Aunies (2005), pada penelitiannya yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan Sesudah Pemekaran”. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini ialah pra maupun pasca pemekaran pertumbuhan ekonomi tidak berdampak di Aceh Tengah, dengan demikian pemekaran wilayah tidak mampu untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah.

C. Kerangka Berpikir

Keberhasilan pemekaran wilayah biasanya dirasakan dengan terwujudnya keadaan yang lebih maju pasca dilakukannya pemekaran dibanding pra dilakukannya pemekaran. Adapun dampak yang ditimbulkan ialah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dapat diketahui dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia dan Sarana Prasarana yang tersedia.

Pada penelitian ini untuk mengetahui Kesejahteraan Masyarakat pasca mekarnya Kota Gunungsitoli dari Kabupaten Nias dapat dilihat dari Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dan Perkembangan Sarana Prasarana yang terjadi di Kabupaten Nias. Indeks Pembangunan Manusia dibagi menjadi 3 indikator yakni Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Begitu juga dengan sarana prasarana yang dikaji yakni sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, dan sarana prasarana ekonomi. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan sarana prasarana. Penjelasan tersebut dapat dicantumkan dalam skema kerangka berpikir seperti berikut



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir